

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah : Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa
 Jumlah Penulis : 3
 Status Pengusul : Penulis pertama
 Identitas Jurnal

- a. Nama Jurnal : Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
- b. ISSN : 2580-0086
- c. Vol. No. Bulan, Tahun. : Vol. 2, No.2 Juni 2019
- d. Penerbit : Universitas Pasundan
- e. URL Artikel (Jika ada) : <https://journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/view/2326/1160>
- f. Repository/ Web :
- g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah:
(beri \checkmark pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review*

Komponen yang dinilai	Nilai maksimal jurnal ilmiah			Nilai akhir yang diperoleh
	Internasional / Int. Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
	24	10		
a. Kelengkapan Unsur Isi Artikel (10%)	2.4	1		0,6
b. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)	7.2	3		1,8
c. Kecukupan & Kematakhiran Data/ Informasi & Metodologi (30%)	7.2	3		1,8
d. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/ Jurnal (30%)	7.2	3		1,8
Total = (100%)	24	10		6,0

CATATAN PENILAIAN

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi artikel: \checkmark
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: \checkmark
3. Kecakupan dan kematakhiran data/ informasi dan metologi: \checkmark
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: \checkmark
5. Indikasi plagiat: \times
6. Kesesuaian bidang ilmu: SESUAI DENGAN CABANG ILMU
 NILAI : $60\% \times (10) = 6.$

$60\% \times 10$

Bandung, September 2021

(H. ASEP SJAMSUL BACHRI)

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa
Jumlah Penulis : 3
Status Pengusul : Penulis pertama
Identitas Jurnal

- a. Nama Jurnal : Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
- b. ISSN : 2580-0086
- c. Vol. No. Bulan, Tahun. : Vol. 2, No.2 Juni 2019
- d. Penerbit : Universitas Pasundan
- e. URL Artikel (Jika ada) : <https://journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/view/2326/1160>
- f. Repository/ Web :
- g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah: Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review

Komponen yang dinilai	Nilai maksimal jurnal ilmiah			Nilai akhir yang diperoleh
	Internasional / Int. Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
	24	30	0	
a. Kelengkapan Unsur Isi Artikel (10%)	2.4	3.0		3
b. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)	7.2			
c. Kecukupan & Kemutakhiran Data/ Informasi & Metodologi (30%)	7.2	9.0		2
d. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/ Jurnal (30%)	7.2	9.0		
Total = (100%)	24	30		18

CATATAN PENILAIAN

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi artikel: \checkmark
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: \checkmark
3. Kecakupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metologi: \checkmark
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: \checkmark
5. Indikasi plagiat: \checkmark
6. Kesesuaian bidang ilmu: \checkmark

$$\frac{60}{100} \times (30) = 18$$

Bandung, September 2021

[Signature]
Prof. Dr. Bambang Heru, M.I

**PERANAN KEPALA DESA TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN MASYARAKAT DESA**

Dadang Mulyana, T. Subarsah, Deni Zein Tarsidi

dadangmulyana@unpas.ac.id, t.subarsah@unpas.ac.id, denizein@unpas.ac.id

PPKn Universitas Pasundan, FH Universitas Pasundan, PPKn Universitas Pasundan

Abstract

This research was motivated by the issuance of Law No. 12 of 1994 concerning the United Nations aimed at making taxpayers more obedient to the law in paying the United Nations. But in the reality that happens in the community, there are still many taxpayers who are not obedient to UN regulations. Moreover, some taxpayers who still do not understand or know the benefits of the Law No. 12 of 1994 concerning the United Nations. For this reason, actions need to be taken from the village head so that taxpayers can be aware of or obey the UN payments, one of which is the socialization of the Law so that taxpayers know and understand the existence of the Law. Based on the results of the analysis of this study, data was obtained that the efforts of the village head were not very influential in an effort to increase the legal awareness of taxpayers to pay the United Nations in Blendung Village, Purwadadi Sub-District, Subang Regency. Because, the violation data that occurred in 2015 did not change until 2016. This was caused by several factors, including: lack of strict sanctions given by village officials against taxpayers who violated Law Number 12 of 1994 concerning the UN, the absence of socialization specifically carried out by village officials, so that they cannot touch all layers of the taxpayer.

Keywords: *Village Chief, Awareness, Tax*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB bertujuan agar masyarakat wajib pajak lebih taat pada hukum dalam membayar PBB. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak taat pada peraturan PBB. Lebih dari itu, beberapa masyarakat wajib pajak yang masih kurang memahami atau mengetahui manfaat adanya UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB. Untuk itu diperlukan adanya tindakan – tindakan dari kepala desa supaya para wajib pajak dapat sadar atau taat dalam pembayaran PBB, salah satunya merupakan kegiatan sosialisasi mengenai UU tersebut agar wajib pajak mengetahui dan memahami dengan adanya UU tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, diperoleh data bahwa usaha yang dilakukan kepala desa tidak terlalu berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Sebab, data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat desa terhadap wajib pajak yang melanggar UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, tidak adanya sosialisasi yang khusus yang dilakukan oleh aparat desa, sehingga tidak bisa menyentuh seluruh lapisan wajib pajak.

Kata Kunci: *Kepala Desa, Kesadaran, Pajak*